

Konstruktivisme dalam Diskursus Kebangkitan Cina di Asia Timur

Muhammad Nizar Hidayat¹

¹Universitas Lambung Mangkurat (nizar.hidayat@ulm.ac.id)

Submitted: date month year; accepted: (leave in blank)

ABSTRACT

The discourse on the "revival" of China has become a hot topic of discussion and study in the study of International Relations. This is inseparable from the complexity of politics and security in the East Asia region which has its own problems. The debate about this phenomenon then became the central topic of debate between the paradigms of Realism and Liberalism. These two classical schools of thought in the study of IR do offer interesting explanations in the context of China's "revival" and its relationship to security complexities in the East Asian region. However, this paper tries to look at this phenomenon outside the two major schools of thought. For that purpose, this paper aims to present a few alternative views generated from the Constructivism point of view.

Keywords: The Revival of China, Realism, Liberalism, Constructivism

ABSTRAK

Diskursus mengenai "kebangkitan" Cina menjadi topik yang hangat dibicarakan dan dikaji dalam studi Hubungan Internasional. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas politik dan keamanan di kawasan Asia Timur yang menyimpan problematikanya sendiri. Perdebatan tentang fenomena ini kemudian menjadi topik sentral perdebatan antara paradigma Realisme dan Liberalisme. Dua mazhab klasik dalam studi HI ini memang menawarkan penjelasan yang menarik dalam konteks "kebangkitan" Cina dan hubungannya dengan kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur. Meski demikian tulisan ini mencoba untuk melihat fenomena ini diluar dua mazhab besar tersebut. Untuk tujuan itu maka tulisan ini bertujuan untuk menyajikan sedikit pandangan alternatif yang dihasilkan melalui sudut pandang Konstruktivisme.

Kata Kunci: Kebangkitan Cina, Realisme, Liberalisme, Konstruktivisme

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai "kebangkitan" Cina menjadi topik yang hangat dibicarakan dan dikaji dalam studi Hubungan Internasional. Umumnya kebangkitan Cina tersebut dilihat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kekuatan militer

yang dimiliki oleh Cina. Dengan tingkat pertumbuhan GDP yang selalu tercatat berada diatas 5% tiap tahunnya sejak 2011 sampai 2019 (sebelum pandemic Covid 19), Cina adalah kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (O'Neill, 2022). Keberhasilan Cina dalam meningkatkan GDP dalam tiga dekade

terakhir juga telah membebaskan lebih dari 800 juta penduduknya dari kemiskinan (The World Bank, 2022). Dari segi kekuatan militer, Cina juga menempati kekuatan ke tiga setelah Amerika Serikat dan Rusia menurut data yang dikeluarkan oleh *globalfirepower* pada tahun 2022 (*globalfirepower*, 2022).

Dengan statistik semacam itu maka kita sedikit bisa memahami mengapa hubungan internasional di kawasan Asia Timur menyimpan dinamika yang kerap menjadi perhatian para penstudi Hubungan Internasional. Mengapa Asia Timur? Hal ini tidak terlepas dari kehadiran AS di kawasan tersebut yang kemudian menjalin aliansi strategis baik secara ekonomi maupun militer dengan Negara Asia Timur lainnya seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Ditambah dengan sejarah okupansi Jepang terhadap Negara Asia Timur lainnya, maka kompleksitas hubungan internasional di Asia Timur selalu dibahas melalui narasi bipolar perang-damai, atau *conflict-peace*.

Bipolaritas narasi dalam studi HI khususnya terkait dengan “kebangkitan” Cina sebagai salah satu kekuatan (baik ekonomi maupun militer) ini kemudian identik dengan pembahasan melalui lensa Realisme dan Liberalisme. Seakan mengulang perdebatan besar dalam studi HI sebelumnya, “kebangkitan” Cina membuat perdebatan antara dua mazhab besar ini kembali menarik untuk diikuti. Dari sisi Realisme (dan turunannya) konflik atau setidaknya gesekan antara *existing power* (khususnya AS) tidak akan terhindarkan dan pada akhirnya ini akan berujung pada penekanan aspek militer untuk mempertahankan pengaruh di kawasan (Kirshner, 2012; Li, 2015; Sibley, 2013). Sebaliknya, pandangan Liberalisme (dan turunannya) melihat intergasi ekonomi serta independensi yang terjalin di antara Negara Asia Timur (dan juga AS) berfungsi sebagai “peredam” konflik dan menjadi resep utama dalam menjaga perdamaian di kawasan (Beeson & Islam, 2010; Goswami, 2012; Tyfield, 2018).

Dua mazhab klasik dalam studi HI ini memang menawarkan penjelasan yang menarik dalam konteks “kebangkitan” Cina

dan hubungannya dengan kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur. Meski demikian tulisan ini mencoba untuk melihat fenomena ini diluar dua mazhab besar tersebut. Untuk tujuan itu maka tulisan ini bertujuan untuk menyajikan sedikit pandangan alternatif yang dihasilkan melalui sudut pandang Konstruktivisme. Mazhab Konstruktivisme memiliki perbedaan penting dengan dua mazhab sebelumnya khususnya pada dimensi ontologis. Perdebatan yang seringkali dibingkai dengan perdebatan esensialis versus non-esensialis ini tidak kalah menariknya dibandingkan dengan perdebatan klasik antara Realisme dan Liberalisme. Oleh sebab itu maka bagian selanjutnya akan disajikan secara garus besar asumsi-asumsi dasar dari Realisme dan Liberalisme serta kelemahannya masing-masing. Selanjutnya akan disajikan penjelasan melalui lensa Konstruktivisme beserta asumsi dasarnya dan bagian terakhir adalah penutup.

TINJAUAN PUSTAKA

Mengingat topik yang dibahas ini merupakan topik yang sangat menarik bagi penstudi HI, maka terdapat cukup banyak tulisan yang membahas mengenai “kebangkitan” Cina dari beragam perspektif. Misalnya tulisan Dewa Ayu Putu Eva Wishanti (2016) yang fokus pada aspek dominasi ekonomi Cina di kawasan Asia Timur. Wishanti mengatakan bahwa berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi Cina selama beberapa tahun belakangan, maka dapat diduga kuat bahwa Cina pada akhirnya akan mendominasi perekonomian di Asia Timur, mengalahkan Jepang dan Korea Selatan. Meski demikian, corak “permusuhan” di antara negara-negara Asia Timur masih terus menjadi variabel yang menentukan apakah hegemoni Cina pada bidang ekonomi ini akan berdampak positif atau negatif terhadap stabilitas keamanan dan politik regional. Untuk itu, Wishanti berpendapat bahwa stabilitas kawasan akan bisa terwujud apabila hegemoni Cina di bidang ekonomi diarahkan untuk mencapai integrasi ekonomi di antara negara-negara Asia Timur. Dengan kata Lain Wishanti

secara tidak langsung mengulang kembali tesis Liberalisme yang mengedepankan kerjasama ekonomi (dalam hal ini berwujud integrasi ekonomi regional) sebagai penawar konflik di antara negara-negara kawasan.

Selanjutnya ada tulisan Fathin Nisa Muthia Harahap (2020) yang menganalisis kebijakan *One Belt One Road* sebagai instrumen utama Cina untuk menjadi *great power* dan sekaligus memantapkan status Cina di kawasan Asia Timur sebagai negara hegemoni. Berkaitan dengan analisa Wishanti sebelumnya, Harahap mengatakan bahwa meskipun OBOR merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh motif ekonomi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan corak otoritatif pemerintah Cina, maka OBOR juga membawa misi untuk memperkuat militer Cina. Dengan kekuatan ekonomi dan militer yang tertinggi di antara negara-negara Asia Timur lainnya, maka tidak mengherankan apabila OBOR merupakan instrumen utama untuk mencapai status hegemon.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang berupaya untuk menggambarkan fenomena “kebangkitan” Cina melalui perspektif Konstruktivisme. Namun sebelum menjelaskan bagaimana Konstruktivisme melihat fenomena ini, akan disajikan asumsi dasar Realisme dan Liberalisme sebagai pembandingan. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari penelitian-penelitian yang terkait dengan Cina dan konfigurasi hubungan internasional di kawasan Asia Timur dan juga pemikiran-pemikiran penstudi Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme melalui studi pustaka.

HASIL DAN ANALISA

Asumsi Dasar Realisme Dan Liberalisme

Asumsi Realis mengatakan bahwa negara-negara di dunia berinteraksi dalam kondisi anarkis dan negara-negara tersebut selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya demi kebelangsungan hidupnya (Burchill et al., 2005). Anarkisme yang berarti

tidak adanya suatu pemerintahan dunia yang mengatur negara-negara atau dengan bahasa lain tidak ada yang lebih berdaulat diatas kedaulatan negara, memberi dorongan bagi negara-negara untuk bertindak egois. Kekuatan menjadi aspek utama dalam kajian Realis, dimana semua aktivitas yang dilakukan oleh negara selalu dikaitkan dengan kapasitas kekuatan yang dimilikinya (Sterling-Folker, 2006). Mereka yang memiliki kekuatan lebih besar akan memaksakan kepentingannya pada yang lebih lemah. Asumsi yang lebih penting menekankan bahwa pergeseran kekuatan yang terjadi diantara para aktor akan menghasilkan suatu tindakan tandingan untuk mengimbangnya. Dalam kasus “kebangkitan” Cina ini, maka hal tersebut diartikan bahwa negara-negara lain akan merasa terancam dengan kekuatan baru Cina dan akan berusaha untuk melakukan sesuatu untuk meresponsnya. Respon yang dipikirkan oleh para Realist tentu saja respon yang berupa perang besar untuk mempertahankan status quo di kawasan Asia Timur.

Namun menariknya, perang semacam itu tidak pernah terjadi di Asia Timur. Diskursus mengenai “kebangkitan” Cina telah beredar di kalangan akademisi sejak tahun 80-an namun konflik besar yang melibatkan negara-negara besar seperti Jepang, Amerika Serikat, Russia dengan Cina tidak pernah terjadi. Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi para penstudi HI dengan latar belakang Liberal. Paradigma Liberal sebagai *contending paradigm* dari Realist berargumen bahwa apa yang terjadi di Asia Timur merupakan suatu bentuk interdependensi ekonomi yang berhasil mencegah terjadinya perang diantara aktor-aktor yang ada. Asumsi Liberal mengatakan bahwa jika perdagangan bebas dilaksanakan, maka para aktor yang terlibat akan merasakan keuntungan besar bersama, dimana biaya (*cost*) untuk berperang dan merusak semua tatanan perdagangan yang telah ada lebih besar daripada keuntungan (*benefits*) yang bisa mereka dapatkan dari perang tersebut (Griffiths, 2007; Hammarlund, 2005). Cina terlibat dalam kepentingan ekonomi yang sangat dalam di

kawasan Asia Timur, terlebih dengan Jepang dan Korea Selatan. Resiko perang besar yang bisa sewaktu-waktu mengancam kawasan dianggap mencegah para aktor untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa memprovokasi pecahnya perang. Kebangkitan Cina sebagai raksasa ekonomi dunia tidak membuat negara-negara di kawasan merasa terancam, malah hal tersebut menjadikan mereka semakin kooperatif dalam bidang perekonomian dimana perekonomian Cina yang tumbuh besar merupakan suatu hal yang menguntungkan mereka juga.

Sekilas tampak bahwa Liberal bisa dengan sangat meyakinkan menjelaskan fenomena yang terjadi di Asia Timur dengan interdependensi ekonominya. Namun beberapa kejadian justru menunjukkan bahwa asumsi Liberal tersebut tidak selamanya tepat. Hal ini bisa dilihat dengan mata telanjang, dimana derajat *enmity* antar negara-negara di Asia Timur sangat tinggi terlepas dengan tingginya tingkat interdependensi ekonomi yang mereka hadapi. Cina dan Jepang masih bertikai mengenai sejarah pendudukan Jepang di Cina yang dianggap oleh masyarakat Cina sebagai periode kelam sejarah negara mereka dimana tentara Jepang secara brutal membantai warga Cina selama masa pendudukan tersebut. Kemudian konflik juga merembet pada sejarah pendudukan Jepang di Cina, dimana kunjungan pemimpin politik Jepang ke kuil Yashukuni yang merupakan kuil persembahan bagi para prajurit Jepang yang tewas di Perang Dunia dianggap sebagai suatu hal yang sangat menghina negara-negara di kawasan Asia timur tidak hanya oleh Cina, namun juga Korea Selatan dan Korea Utara. Konflik Cina dan Jepang mengenai kepulauan *Diaoyu/Senkaku* juga turut mewarnai derajat *enmity* di Asia Timur. Selain itu, konflik antara Cina dan Taiwan juga tidak bisa begitu saja dilupakan. Konflik yang berakar dari perang saudara di Cina itu sampai saat ini masih berlangsung dengan Cina yang mengklaim bahwa Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negaranya.

Dengan demikian asumsi Realis dan Liberal mengenai fenomena yang terjadi di Asia Timur dianggap tidak cukup dalam

menjelaskan mengapa “kebangkitan” Cina sebagai raksasa ekonomi dan militer dunia tidak diikuti dengan perang besar yang dipicu oleh keinginan negara-negara lain untuk melanggengkan status quo dan juga mengapa konflik-konflik antara negara di kawasan tetap saja terjadi meskipun interdependensi ekonomi antar negara-negara di Asia Timur diklaim tinggi. Untuk itu dirasa perlu untuk mencari alternatif lain dalam mendekati fenomena mengenai “kebangkitan” Cina ini.

Kontruktivisme dan Peran Cina dalam Politik dan Keamanan Asia timur

Ketika berbicara mengenai politik dan keamanan di kawasan Asia Timur dan dikaitkan dengan “kebangkitan” Cina dari segi militer dan ekonomi, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Menurut Realis akan terjadi perang besar, dan menurut Liberal akan tercipta interdependensi ekonomi yang justru akan mencegah perang. Jika dikaitkan dengan peran yang dimainkan oleh Cina, maka realis akan berkata bahwa peran Cina dalam politik dan keamanan di Asia Timur adalah sebagai kekuatan utama yang bisa mendorong kawasan untuk terlibat perang besar atau tidak. Disini Cina diposisikan sebagai aktor yang berhadapan dengan aktor lain seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan AS. Cina memainkan peran yang strategis mengingat besarnya kekuatan ekonomi dan militer yang mereka miliki. Cina bisa berperan sebagai *balancer* bagi kehadiran AS di kawasan, atau justru menjadi *hegemon* di Asia Timur, dua konsep yang merupakan ciri khas dari asumsi Realis. Sebaliknya, Liberal akan mengatakan bahwa Cina memainkan peran yang sama pentingnya dengan aktor lain, disebabkan oleh interdependensi ekonomi yang berlangsung diantara aktor-aktor di kawasan. Disini posisi Cina adalah sebagai satu aktor di antara jaring-jaring ekonomi kawasan, dimana kondisi perekonomian Cina turut mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara lain di kawasan. Contohnya jika perekonomian Cina melambat, maka hal itu akan mempengaruhi perekonomian Jepang dimana kedua negara saling membutuhkan

satu sama lain. Cina membutuhkan teknologi dari Jepang, sedangkan Jepang membutuhkan bahan mentah dari Cina. Peran Cina dalam politik dan keamanan kawasan dalam sudut pandang Liberal merupakan peran yang sekunder dalam artian bahwa politik dan keamanan ditentukan oleh kondisi ekonomi yang ada. Oleh sebab itu, penting bagi negara-negara di kawasan untuk menjaga agar perokonomian mereka stabil.

Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah: peran apa yang sebenarnya dimainkan oleh Cina ketika negara itu terlibat secara dalam dari segi perekonomian dengan negara-negara kawasan lain, namun disatu sisi tetap memiliki kadar *enmity* yang tinggi terhadap mereka?. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Cina itu tidak bisa dijelaskan dengan paradigma Realis dan Liberal. peran yang dimainkan oleh Cina jika dilihat dari kedua paradigma tersebut akan sangat bertolak belakang. Jika dilihat dari sudut pandang Realis, maka tindakan Cina dalam konfliknya dengan Taiwan dan Jepang menyangkut klaim teritorial contohnya, merupakan suatu hal yang rasional mengingat asumsi mereka yang mengatakan bahwa negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya, dalam hal ini termasuk kekuatan dalam bidang teritorial (Morgenthau, 1963). Namun disatu sisi, konflik tersebut tidak rasional dalam pandangan Liberal, karena hanya akan merugikan Cina dari segi ekonomi dimana hal itu akan membuat perekonomian kawasan menjadi tidak stabil.

Untuk menjembatani perbededaan tersebut paradigma Konstruktivisme digunakan disini. Tulisan ini berargumen bahwa peran yang dimainkan Cina tidak bisa dilepaskan dari identitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Disini, Konstruktivisme menjadi penting untuk dibahas. Konstruktivisme merupakan paradigma yang menekankan pada karakter dari identitas dan kepentingan aktor dalam HI yang *socially constructed*, serta pada keyakinan mereka bahwa perubahan sangat mungkin terjadi bahkan pada hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin untuk berubah (Phillips, 2007). Pembahasan tentang peran Cina dalam politik

dan keamanan di Asia Timur seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan memakai paradigma Realis dan Liberal berangkat dari asumsi bahwa kepentingan nasional Cina merupakan sesuatu yang *given*. Asumsi esensialist yang melekat pada Realis dan Liberal itu menjadi salah satu bagian dimana para pendukung Konstruktivisme bersepakat untuk menentangnya. Realis dan Liberal berasumsi bahwa negara merupakan aktor yang memiliki kepentingan sendiri terlepas dari kondisi sosial yang ada, atau dalam bahasa lain disebut dengan *ontological atomism* (Griffiths, 1999). Sedangkan keberatan selanjutnya yang disampaikan oleh para Konstruktivis adalah klaim materialis dari Realis dan Liberal. Alexander Wendt menjelaskan hal ini dengan dangat baik dalam bukunya *Social Theory of International Politics* dimana ia menyebutkan bahwa terdapat dua asumsi utama dari Konstruktivisme, yakni bahwa 1) struktur dari asosiasi manusia ditentukan oleh *shared ideas* ketimbang kekuatan material, dan 2) identitas dan kepentingan dari aktor dibentuk dari *shared ideas* ini ketimbang diasumsikan sebagai suatu yang alami (Wendt, 1999). Lebih lanjut menurut Alexander Wendt, Konstruktivisme merupakan struktur teori dalam HI yang menekankan pada klaim bahwa: 1) negara merupakan unit utama dalam mempelajari HI, 2) kunci utama dalam struktur dalam sistem internasional adalah intersubjektifitas bukan material, 3) identitas dari negara dan kepentingannya merupakan hal yang penting untuk dipelajari dan mereka terbentuk dari struktur sosial alih-alih sebuah konstanta seperti yang kaum rasionalis katakan (Griffiths et al., 2008).

Analisis yang diberikan oleh Realis dan Liberal selalu diawali oleh adanya suatu asumsi tentang kepentingan negara sebelum negara tersebut berinteraksi dengan negara lain di dunia internasional. Dalam kasus ini, Cina diposisikan sebagai negara dengan kepentingan untuk meningkatkan kekuatannya di kawasan Asia Timur bagi Realis dan negara dengan kepentingan untuk menjaga stabilitas perokonomian kawasan bagi Liberal. Berdasarkan asumsi itu maka

terjadi konflik rasionalitas dari peran Cina di Asia Timur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Menariknya, aspek rasionalitas juga menjadi sumber kritik para penstudi Konstruktivis. Rasionalitas yang dijadikan asumsi Realis dan Liberal merupakan rasionalitas yang berbasis materi. Oleh sebab itu, insentif negara, dalam kasus ini Cina, dalam mengambil tindakan di Asia Timur diasumsikan didorong oleh motif materi, yakni berupa kekuatan militer dan teritorial serta ekonomi. Rasionalitas yang berbasis materi ini disebut juga dengan *instrumental rationality*. Oleh karena rasionalitas yang didasarkan pada materi, maka peran Cina dalam paradigma Realis dan Liberal mempunyai masalah besar, dimana bila dilihat dari rasionalitas material Realis, maka konflik Cina dan Jepang mengenai kepulauan *Diaoyu/Senkaku* merupakan hal yang rasional karena menyangkut aspek material berupa teritori, namun di satu sisi hal tersebut bertolakbelakang dengan klaim rasionalitas dari Liberal yang mengatakan bahwa konflik akan merugikan Cina dari segi materi berupa perekonomian yang tidak stabil. Perbedaan mendasar tentang klaim rasionalitas dari Realis dan Liberalis ini diperuncing dengan asumsi mereka yang lain yakni *empirical positivism* (Griffiths, 1999). Realis dan Liberal percaya bahwa kebenaran dalam ilmu sosial bisa diraih melalui pengamatan-pengamatan yang empiris, dan bukan tidak mungkin akan menemukan suatu hukum alam yang mendasari interaksi antar negara-negara di dunia. Ambisi ini merupakan ambisi dari para penstudi HI berhaluan positivis untuk mensejajarkan ilmu sosial dan HI dengan ilmu alam yang sudah sangat mapan dengan hukum-hukumnya. Dengan asumsi semacam itu, maka Realis dan Liberal akan terjebak pada kondisi dimana keduanya akan saling menyalahkan satu sama lain karena beranggapan bahwa apa yang diasumsikan masing-masing paradigma merupakan suatu hal yang alami.

Disini Konstruktivisme berbeda dengan kedua paradigma tersebut. Konstruktivisme menolak klaim dari para rasionalis yang mengatakan bahwa studi HI bisa dipelajari

secara objektif dengan menganggap bahwa variabel-variabel yang ada dalam HI berada diluar para penstudi, dan adalah tugas para penstudi HI untuk menemukan suatu hukum tetap yang mengatur dunia ini secara rasional. Konstruktivisme menganggap bahwa klaim rasionalitas merupakan sesuatu yang relatif. Mengutip pendapat sosiolog ternama, Max Weber yang mengatakan bahwa rasionalitas tidak hanya berbentuk *instrumental* atau material, namun juga ide dan nilai yang disebutnya *value-rational behaviour*. Berbeda dengan *instrumental rationality*, *value-rational behaviour* didorong oleh ide, nilai dan norma. Suatu perilaku aktor yang dipandang dari *instrumental rationality* sebagai suatu hal yang irasional mungkin bisa jadi sangat rasional dalam pandangan *value-rationality behaviour*. Contohnya adalah perilaku welas asih dari tokoh-tokoh spiritual ternama di dunia yang rela mengorbankan hidupnya demi menolong orang-orang yang membutuhkan. Perilaku semacam itu tentu tidak didorong oleh dorongan material yang mungkin bisa berupa kedudukan politik, dan keuntungan ekonomi, namun lebih didorong oleh ide, nilai dan norma kepercayaan yang menyatakan bahwa perilaku semacam itu merupakan perilaku yang mulia.

Klaim rasionalitas semacam itu merupakan basis dari Konstruktivisme. Alih-alih menyatakan bahwa objek material yang mendorong negara untuk melakukan sesuatu, Konstruktivisme percaya bahwa ide, nilai dan normalah yang mendorong aktor-aktor itu. Jikapun ada objek material yang dikaitkan dengan hal tersebut, maka objek material itu hanya akan berarti jika antara aktor-aktor yang terlibat memiliki *shared idea* terhadapnya. Contoh yang paling populer mengenai hal ini adalah pemilikan senjata nuklir dari negara-negara di dunia dimana suatu aktor yang memiliki senjata nuklir mungkin akan bersikap berbeda dengan negara lain yang juga memiliki senjata nuklir. Mengapa AS begitu khawatir akan kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara, namun relatif tidak mengkhawatirkan kepemilikan senjata nuklir oleh Israel?. Hal itu tentu karena adanya *shared idea* antara AS dan Israel bahwa

mereka meupakan sekutu, sedangkan AS dan Korut merupakan musuh. Jika klaim materialis dipakai disini, maka hipotesis yang muncul adalah AS akan merespon mereka yang memiliki senjata nuklir dengan sikap yang sama.

Konstruktivisme menekankan pada interaksi sosial antar aktor di dunia internasional dimana dunia internasional merupakan arena bagi para aktor untuk membentuk identitas dan kepentingannya. Dalam kasus Cina, identitas Cina tidak berasal dari keadaan alami tiap-tiap negara yang berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dan kekuatan yang mereka miliki, namun selalu berada dalam proses yang cair dan dibentuk oleh interaksinya dengan negara-negara lain di kawasan Asia Timur. Berangkat dari premis diatas, maka kita bisa berargumen bahwa peran yang dimainkan Cina dalam politik dan keamanan kawasan Asia Timur berasal dari identitas mereka yang dibentuk secara sosial melalui interaksi yang intens dengan negara-negara lain di kawasan. Dengan demikian “kebangkitan” Cina bisa dilihat bukan hanya dari asumsi Realis yang mengatakan bahwa Cina selalu berupaya untuk memperbesar kekuatannya, namun juga dari ide dan nilai yang dianut oleh pemimpin Cina bahwa mereka merupakan bangsa yang besar dan sudah sewajarnya mendapat kedudukan yang terhormat dalam dunia internasional. Yan Xuetong, direktur Institute for International Studies di Qinhua University mengatakan bahwa “[T]he Chinese regard their rise as regaining China’s lost international status rather than obtaining something new....[They] consider the rise of China as a restoration of fairness rather than gaining advantages of other.”(Yong, 2008). Penstudi lainnya, Andrew Nathan dan Robert Ross mengatakan bahwa identitas Cina yang menganggap bahwa pentingnya Cina untuk mendapatkan status yang terhormat di dunia internasional juga didorong oleh pengalaman sejarah mereka yang pernah “dipermalukan” oleh bangsa Barat pada abad ke 19 (Liu, 2010).

Untuk itu, jika kita ingin berbicara mengenai peran yang dimainkan oleh Cina

dalam politik dan keamanan di kawasan Asia Timur tidak bisa lepas dari kosntruksi sosial yang terjadi diantara Cina dan negara-negara di kawasan tersebut. Peningkatan kekuatan militer dan ekonomi Cina hingga mencapai kekuatan kedua terbesar setelah AS tidak serta merta bisa dipakai untuk menjelaskan peran Cina adalah sebagai *counter hegemon* dan *balancer* dari keberadaan AS di kawasan, juga tidak bisa kita nyatakan bahwa Cina memainkan peran yang pasifis dikarenakan kepentingan ekonominya yang sangat berkaitan dengan stabilitas kawasan. Interaksi sosial antara Cina dan negara-negara lain dikawasan itulah yang membentuk peran dari Cina. Peran itu bisa datang dari pembentukan identitas Cina yang berasal dari sejarah Cina sendiri, persepsi negara lain terhadap Cina, norma yang ada di dunia internasional atau pertemuan diantara faktor-faktor tersebut. Oleh sebab itu, jika ditanyakan “peran apakah yang dimainkan Cina dalam politik keamanan di Asia Timur?” maka jawabannya bisa bermacam-macam, tergantung dengan siapa Cina berinteraksi dan oleh siapa pertanyaan tersebut dilontarkan?. Contohnya adalah ketika Cina memfasilitasi pertemuan antara Korut dan negara-negara lain dalam *Six Party Talk*. Apakah peran Cina itu merupakan perannya sebagai negara pasifis yang tidak menghendaki perang nuklir di kawasan? Lalu bagaimana dengan konfrontasi Cina dan Jepang kemudian Cina dan Taiwan mengenai klaim teritorial? Bukankah itu merupakan kebalikan dari sikap pasifis dan lebih menunjukkan peran Cina sebagai suatu negara yang agresif dan mengancam stabilitas kawasan?. Konstruktivisme memberi jawaban dengan mengatakan bahwa dalam kasus Cina dan Korut mengenai *Six Party Talk*, maka Cina merasa bertanggung jawab sebagai suatu negara yang besar. Memang, status sebagai negara besar memberikan beban bagi Cina untut turut serta mengurus permasalahan dunia. terlebih lagi, Cina dan Korut memiliki *shared idea* dimana mereka mengidentifikasi diri sebagai sekutu, oleh sebab itu, nuklir Korut bukan merupakan ancaman bagi Cina. Sedangkan dalam kasus perseteruannya dengan Jepang dan Taiwan,

Cina mengkonstruksikan diri sebagai musuh, terlebih dalam bidang sosial dan kultural dimana mereka berbeda secara ideologis dengan Taiwan yang nasionalis dan dengan Jepang yang dianggap sebagai negara penjajah. Oleh sebab itu maka konflik yang terjadi diantara mereka tetap terjaga. Selain itu, klaim tentang “kebangkitan” Cina ini juga tidak bisa secara sepihak digeneralisasi menjadi sesuatu yang mengancam kawasan atau tidak. Hal ini tergantung pada persepsi masing-masing negara terhadap Cina. Seperti yang disampaikan oleh Mutiah Alagappa bahwa negara-negara di Asia Timur tidak memiliki persepsi yang sama terhadap Cina, dimana negara seperti Taiwan mempersepsikan Cina sebagai ancaman nyata, namun tidak bagi Korea Selatan yang disatu sisi mengakui bahwa Cina merupakan negara besar, namun bukan sebagai ancaman.

KESIMPULAN

Diskursus mengenai “kebangkitan” Cina selalu menarik untuk dibahas dan dikaji. Jika dikaitkan dengan peran Cina dalam politik dan keamanan di kawasan Asia Timur hal ini tidak terlepas dari pertanyaan umum mengenai apakah “kebangkitan” Cina tersebut mengancam negara-negara lain atau tidak? Cina memainkan peran sebagai negara pasifis atau negara agresif?. Ketika asumsi Realis dan Liberal dianggap tidak cukup kuat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan melihat sikap Cina yang seakan bertolak belakang dari satu sikap ke sikap yang lainnya, maka paradigma Konstruktivisme memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu kita untuk melihat fenomena tersebut melalui kacamata yang lain. Klaim tentang konstruksi identitas, persepsi dan *shared ideas* diantara para aktor di kawasan Asia Timur ternyata berperan penting dalam pembentukan peran Cina dalam politik dan keamanan di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Beeson, M., & Islam, I. (2010). *The Journal of Development Neo-liberalism and East*

Asia : Resisting the Washington Consensus. October 2014, 37–41.
<https://doi.org/10.1080/0022038042000309214>

Burchill, S., Reus-Smit, C., Paterson, M., Donnelly, J., True, J., Devetak, R., & Linklater, A. (2005). *Theories of International Relations : Third Edition*. In *Book* (p. 321).
http://isbndb.com/d/book/theories_of_international_relations_a07

globalfirepower. (2022). *2022 China Military Strength*.
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=china

Goswami, N. (2012). *Power Shifts in East Asia : Balance of Power vs . Liberal Institutionalism*.

Griffiths, M. (1999). *Fifty Key Thinkers in International Relations*. Routledge.

Griffiths, M. (2007). *International relations theory for the twenty-first century: An introduction*. In *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*.
<https://doi.org/10.4324/9780203939031>

Griffiths, M., Callaghan, T. O., & Roach, S. C. (2008). *International Relations: The Key Concepts, Second Edition*. In *International Relations* (2nd ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203402801>

Hammarlund, P. A. (2005). *Liberal Internationalism and the Decline of the State: The Thought of Richard Cobden, David Mitrany and Kenichi Ohmae*. Palgrave Macmillan.

Harahap, F. N. M. (2020). Analisis Potensial Tiongkok Untuk Menjadi Negara Hegemon di Kawasan Asia Timur Melalui Strategi. *Journal of International Relations*, 6, 164–172.

- Kirshner, J. (2012). *European Journal of International*.
<https://doi.org/10.1177/1354066110373949>
- Li, X. (2015). *Applying offensive realism to the rise of China : structural incentives and Chinese diplomacy toward the neighboring states*.
<https://doi.org/10.1093/irap/lcv019>
- Liu, Q. (2010). China's Rise and Regional Strategy : Power , Interdependence and Identity. *Journal of Cambridge Studies*, 5(4), 76–92. <http://journal.acs-cam.org.uk/data/archive/2010/201004-article7.pdf>
- Morgenthau, H. J. (1963). *Politics Among Nations*. Alfred.A.Knopt.
- O'Neill, A. (2022). *Countries with the largest gross domestic product (GDP) 2020*.
- Phillips, A. B. (2007). Constructivism. In M. Griffiths (Ed.), *International Relations Theory for the Twenty-First Century An Introduction*. Routledge.
- Sibley, G. M. (2013). *Literature Review : China through the Lens of Realism*. Nighthawks.
<https://digitalcommons.northgeorgia.edu/ngresearchconf/2015/Dahlongega/43/>
- Sterling-Folker, J. (2006). Realist Approaches. In J. Sterling-Folker (Ed.), *Making Sense of International Relations Theory*. Lynne Rienner Publishers.
- The World Bank. (2022). *The World Bank in China*.
- Tyfield, D. (2018). *Liberalism 2.0 and the Rise of China: Global Crisis, Innovation and Urban Mobility*. Routledge.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Wishanti, D. A. P. E. (2016). Kebangkitan China dalam Kerjasama Ekonomi Internasional di Kawasan Asia Timur. *Jurnal Transformasi Global*, 1(1), 1–21.
<https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/4>
- Yong, D. (2008). *China's Struggle For Status The Realignment of International Relations*. Cambridge University Press.